

## **BAB IV**

### **Kesimpulan**

Skripsi ini membahas tentang pengaruh *Fukuda Doctrine* dalam kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Jepang masih merujuk pada *Fukuda Doctrine* dalam hubungan dengan ASEAN, meskipun politik internasional telah banyak berubah. Di dalam penelitian ini dibagi kedalam empat bab dimana didalam bab I membahas tentang latar belakang permasalahan yang terjadi hingga Jepang masih merujuk kepada *Fukuda Doctrine* dalam menjalin kerja sama dengan ASEAN. Dalam bab II menjelaskan tentang dinamika hubungan Jepang dan Asia Tenggara, dan *Fukuda Doctrine* sebagai arah kebijakan Jepang di ASEAN. Sementara di dalam bab III membahas tentang perubahan politik internasional dan latar belakang dipertahankannya *Fukuda Doctrine* dalam relasi Jepang-Asia Tenggara yang dimana didalam bab ini merupakan analisis atas hipotesa yang ada, kemudian ditutup dengan kesimpulan pada bab IV.

Hubungan antara Jepang dan Asia Tenggara yang dulunya senggang akibat apa yang dilakukan Jepang terhadap negara-negara di Asia Tenggara pada saat PD II. Namun pasca perang dunia kedua berakhir Jepang kembali ingin memperbaiki hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Berkat adanya *Fukuda Doctrine* yang di cetuskan oleh Perdana Menteri Takeo Fukuda Jepang mendapat kepercayaan kembali di kawasan Asia Tenggara karena *Fukuda Doctrine* di rasa relevan dengan pandangan yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara

*Fukuda Doctrine* kemudian oleh Jepang digunakan sebagai landasan kerja sama terhadap ASEAN, yang dimana sebelum Perang Dingin usai doktrin ini menekankan pada kerja sama *Bilateral* dan *Multilateral* yang berupa kerja sama di

bidang ekonomi dan juga pemulihan citra Jepang di kawasan Asia Tenggara dan juga kerja sama yang terbatas, pada saat itu hanya berupa kerja sama ekonomi yang berupa pemberian bantuan atau dana oleh Jepang (ODA). Kemudian pasca Perang Dingin usai ranah atau ruang lingkup kerja sama Jepang menjadi sangat luas, yang dahulunya hanya mencakup bidang ekonomi saja, namun sekarang sudah mencakup bidang pendidikan, sosial, budaya dll.

Meskipun politik internasional berubah hingga sekarang *Fukuda Doctrine* masih digunakan sebagai landasan dalam menjalin kerja sama dengan ASEAN. Pada tahun 2017 merupakan perayaan 40 tahun terbentunya *Fukuda Doctrine*, yang merupakan landasan awal hubungan kerja sama Jepang dengan ASEAN hingga masa sekarang ini. Alasan mengapa *Fukuda Doctrine* masih digunakan sebagai landasan kerja sama hingga sekarang karena Jepang merupakan aset penting bagi ASEAN, Jepang merupakan investor kedua paling besar yang berkontribusi di ASEAN jadi posisi Jepang disini sangat menguntungkan bagi ASEAN dan sebaliknya ASEAN juga merupakan aset penting bagi Jepang dalam hal kerja sama ekonomi. Kemudian Jepang juga memiliki peluang sebagai pemimpin ekonomi bagi ASEAN Jepang jika dilihat menurut *foreign direct investment* menduduki peringkat pertama untuk negara yang ada di Asia, kemudian menurut data tabel pada tahun 2013 Jepang menduduki posisi pertama dari *ASEAN Top Ten FDI Country Source*. Jadi bukan tidak mungkin jika Jepang dilihat dari tingkat FDI yang ada, bisa memberikan peluang bagi Jepang untuk menjadi pemimpin ekonomi bagi ASEAN.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, temuan utama dari penelitian ini membuktikan bahwa Jepang dalam kerja samanya dengan ASEAN masih merujuk kepada *Fukuda Doctrine* hingga masa sekarang ini yang dimana dengan adanya *Fukuda Doctrine* ini kita dapat mengetahui

betapa pentingnya ASEAN bagi Jepang yang dimana sesuai dengan teori Regionalisme baru kerja sama antara kedua negara tersebut lebih kepada kerja sama yang bersifat *low politics* atau kerja sama yang menitik beratkan kepada kerja sama dibidang ekonomi. Dan juga sebaliknya Jepang dan juga berpeluangnya Jepang sebagai pemimpin ekonomi ASEAN sesuai dengan analisis dengan konsep Angsa Terbang (*Flying-geese*) menurut mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Saburo Okita. Akan tetapi, dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dalam penelitian mendatang. Meskipun demikian penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meninjau kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN.